



Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Wisata Sungai Bukit Lawang Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat

Police Implementation of The Bukit Lawang River Tourism Development at The Langkat Regency Tourism Service

Nadya Sri Astuti, Novita Wulandari, & Khairunnisa Lubis

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Sungai bukit Lawang oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan parasarana penunjang pengembangan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui Implementasi Kebijakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat. Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan pada Dinas Pariwisata kabupaten Langkat. Penelitian ini menganalisis terlebih dahulu dengan analisis Edwards III, Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini sebanyak 7 orang informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti keterbatasan anggaran, sulit mengaplikasikan tugas sesuai SOP ke masyarakat.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengembangan

Abstract

This research is motivated by the not yet optimal implementation of policies regarding development of the Sungai Bukit Lawang Tourism Destination by the Langkat Regency Tourism Office. This is due to the lack of facilities and infrastructure to support tourism development. This study aims to describe and determine the implementation of policies at the Langkat Regency Tourism Office. As well as to find out the supporting and inhibiting factors of policy implementation at the Langkat Regency Tourism Office. This study analyzes first by analysis (Edwards III, 1980: 1). The research method used is descriptive qualitative method. The informants of this study were 7 informants. Data collection techniques using field studies (observations, interviews, and documentation). This can be seen based on the opinion of the informant who stated that there is still a lack of facilities and infrastructure provided directly by the agency. There are perceived obstacles such as budget constraints, difficulty applying tasks according to SOP to the community.

Keywords: Implementation, Policy, Development

How to Cite: Nadya Sri Astuti, Novita Wulandari & Khairunnisa Lubis, (2023), Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Wisata Sungai Bukit Lawang Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(2) 2023: 99-105

**E-mail:* astutinadya12@gmail.com

ISSN [2828-6537](https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i2.2150) (Online)

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur, menyediakan, dan mengalokasikan berbagai infrastruktur yang berhubungan dengan sektor pariwisata. Kebijakan makro yang diterapkan oleh pemerintah menjadi panduan bagi para pengelola yang berperan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengembangan sektor pariwisata. Dalam hal ini, perencanaan yang komprehensif menjadi kunci, yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pengembangan pariwisata (Suharyanto et al., 2019, 2020; Suharyanto & Batubara, 2023). Pentingnya perencanaan yang matang adalah untuk merancang beragam inisiatif pengembangan yang dapat memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan, sementara pada saat yang sama, mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul. Selain itu, perencanaan ini harus memasukkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pariwisata adalah langkah kunci yang harus ditempuh. Masyarakat setempat perlu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sangat besar dalam keberhasilan destinasi pariwisata yang berada di wilayah mereka (Ulfa et al., 2019).

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang mereka terapkan dalam pengembangan pariwisata mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan memberikan dukungan yang tepat, pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas setempat. Ini akan membantu menciptakan kesinambungan dalam pengembangan pariwisata dan memastikan bahwa destinasi pariwisata tetap berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat (Hidajat et al., n.d.; Lubis et al., 2020).

Indonesia adalah negara yang kaya akan pesona alam dan warisan budayanya, yang membuatnya menjadi destinasi pariwisata yang menarik. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan upaya serius dalam pengelolaan dan perbaikan lingkungan di sekitar objek wisata. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menarik dan nyaman bagi wisatawan sehingga mereka merasa diundang untuk datang dan menjelajahi keindahan alam dan budaya Indonesia (Sinuhaji et al., 2019).

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang terencana dan berkelanjutan, penting untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijak. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan nasional. Selain memberikan pengalaman unik kepada wisatawan, pengelolaan dan pengembangan pariwisata juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan (Rahman, 2021).

Salah satu tujuan utama dari pengelolaan dan pengembangan pariwisata adalah untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan negara. Oleh karena itu, upaya dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata harus dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara, tetapi juga akan menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat untuk negara (Hardiman Sihombing et al., 2023; Situngkir et al., 2020). Masyarakat memiliki beragam tujuan ketika mereka memutuskan untuk berwisata. Salah satu tujuan yang umum adalah untuk melepaskan rasa lelah dan penat akibat rutinitas sehari-hari. Liburan menjadi waktu yang tepat untuk merelaksasikan diri dan mengisi ulang energi yang terkuras selama menjalani aktivitas harian. Bagi banyak orang, liburan adalah kesempatan untuk menjauh sejenak dari kehidupan sehari-hari yang monoton dan memberikan kesempatan untuk merasakan suasana baru (Apriani et al., 2022; Syari & Kadir, 2020).

Namun, setiap individu memiliki motivasi yang berbeda dalam berwisata. Beberapa orang mungkin mencari pengalaman intelektual yang memuaskan. Mereka mungkin ingin memperluas pengetahuan mereka tentang budaya, sejarah, atau alam suatu tempat. Bagi mereka, berwisata adalah kesempatan untuk belajar dan menggali wawasan baru (Rini et al., 2022; Zamzami et al., 2023). Di sisi lain, ada juga kalangan yang melihat berwisata sebagai cara untuk mencari pengalaman yang benar-benar berbeda dari rutinitas mereka. Mereka mencari petualangan dan kegembiraan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dalam prosesnya, mereka berharap dapat merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam (Sari & Pinem, 2023; Syafira et al., 2021). Secara umum, manusia memiliki dorongan untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka dan

memenuhi beragam keinginan mereka. Berwisata adalah salah satu cara untuk mengaktifkan dorongan tersebut. Ini adalah cara untuk mengalami keindahan alam, budaya, dan keragaman dunia yang luar biasa ini, serta untuk menciptakan kenangan indah yang akan dikenang seumur hidup (Atiah et al., 2022; Marini et al., 2023; Nugraheni et al., 2020).

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan objek wisata alam. Di sini, kita dapat menemukan berbagai jenis objek wisata, mulai dari sungai, pantai, pegunungan, hingga kekayaan flora dan fauna yang menakjubkan. Salah satu destinasi wisata yang menonjol di Sumatera Utara adalah Bukit Lawang, yang terletak di Kabupaten Langkat (Lubis et al., 2020; Suharyanto et al., 2022)(Pratomo, 2015). Kabupaten Langkat adalah daerah yang terletak di dataran tinggi Bukit Barisan, sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat 3°14' - 4°13' lintang utara dan 97°52' - 98°45' bujur timur. Wilayahnya yang luas mencapai 626.329 hektar dan terdiri dari 23 kecamatan serta 277 desa dan kelurahan. Ibukota kabupaten ini adalah Stabat (Pratomo, 2015).

Salah satu daya tarik utama di Kabupaten Langkat, khususnya di Bukit Lawang, adalah hutan suaka yang telah dijadikan tempat pengamatan orangutan. Bukit Lawang juga dikenal dengan sungainya yang terkenal dengan derasnyanya arus dan kejernihannya airnya. Kombinasi alam yang menakjubkan ini menjadikan Bukit Lawang sebagai salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Dengan pesona alamnya yang memesona, tidak heran jika Anda sering menjumpai turis yang datang untuk menikmati keindahan alam Bukit Lawang (Pratomo, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi jenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Sebagai penguat, penelitian ini juga terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan (Sugiyono, 2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat dalam meningkatkan potensi wisata sungai Bukit Lawang. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat belum maksimal dalam melakukan kebijakan tersebut, hal tersebut diketahui melalui empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III dalam (Agustino, 2018).

Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif yang memanfaatkan beberapa metode penelitian, termasuk wawancara, observasi, dan pengumpulan data melalui dokumentasi (Moleong, 2011). Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan kontribusi dari tiga jenis informan, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata di daerah tersebut, khususnya dalam konteks wisata sungai di Bukit Lawang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat masih memiliki ruang untuk meningkatkan implementasi kebijakan mereka terkait pengembangan wisata sungai di Bukit Lawang. Evaluasi ini didasarkan pada empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2018).

Pertama, dalam hal komunikasi, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat. Komunikasi yang lebih efektif dapat memastikan bahwa tujuan kebijakan dan rencana pengembangan pariwisata lebih terintegrasi. Kedua, sumber daya, seperti anggaran dan tenaga kerja, perlu dikelola dengan lebih efisien. Pemerintah daerah perlu memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung proyek-proyek pengembangan pariwisata di Bukit Lawang. Ketiga, disposisi, atau semangat dan komitmen dari pihak terkait, perlu ditingkatkan. Ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang potensi pariwisata sungai Bukit Lawang dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dalam pengembangan pariwisata. Keempat, struktur birokrasi harus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Proses birokrasi yang lebih efisien dan transparan dapat mempercepat implementasi rencana pengembangan pariwisata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti beberapa aspek yang dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan potensi wisata sungai di Bukit Lawang, dan dapat memberikan panduan untuk perbaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan pada 20 Desember 2022 sampai 20 Januari 2023, berlokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Langkat Dan Tempat wisata Sungai Bukit Lawang. Informan Pada Penelitian Ini terdiri dari 7 Orang. Bukit Lawang adalah tempat wisata alam dengan pemandangan yang menakjubkan dan sangat populer di Langkat, sehingga tempat wisata bukit Lawang ini menarik untuk dijelajahi pada saat Liburan. Tempat wisata ini di dukung panorama alam yang memukau, mulai dari keindahan sungai, goa, dan sarana prasarana pendukung lainnya berupa akomodasi dan kuliner sekitar Lokasi wisata. Peneliti merujuk pada teori Implementasi Kebijakan Edwards III (1980 : 1) mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan mempunyai empat faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumber daya, proses disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Pengukuran Implementasi kebijakan meliputi 4 indikator yaitu : Komunikasi, sumber daya, disposisi, Struktur birokrasi.

Dimensi Komunikasi, Komunikasi, yaitu Cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi program. Dengan indikator-indikator sebagai berikut: Kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Langkat kepada instansi-instansi terkait tentang pengembangan obyek wisata bukit lawang. Pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi dalam indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Langkat kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata belum jelas dan belum dilaksanakan dengan baik, ini dibuktikan dengan adanya pemungutan retribusi diluar dari petugas yang ditugaskan untuk pengutipan retribusi, yang melabelkan sebagai biaya parkir dengan dikenakan biaya Rp. 10.000 untuk sepeda motor dan Rp.

30.000 buat Mobil. Belum adanya bentuk sanksi bertindak, dalam bentuk perintah dan komunikasi secara langsung juga dalam bentuk kerja sama antar instansi yang berkepentingan. Dan kurang nya himbauan dari dinas pariwisata kepada masyarakat atau pengunjung terkait hal yang dilakukan di tempat pariwisata.

Dimensi Sumber Daya Sumber daya, adalah Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan program, yakni sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan indikator-indikatornya sebagai berikut : Kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya. Ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya untuk indikator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya sudah tercukupi, hal ini dibuktikan dengan adanya staff tour guide yang sudah layak SNI dan mempunyai kompeten atau kemampuan menjadi pramu wisata. Serta tetap mempertahankan dan melestarikan flora dan fauna yang ada di kawasan ekowisata bukit lawang seperti tumbuhan atau hewan yang tidak terdapat di ekowisata lainnya yang hanya ada di ekowisata bukit lawang. Hal tersebutlah yang bisa dijadikan peluang untuk sebagai pengembangan ekowisata bukit lawang di jangka panjang. Indikator Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan terutama dalam hal ini adalah ekowisata Bukit Lawang. Jenis ancaman ini dapat membuat kemunduran serta kerugian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terutama ancaman dalam pengembangan ekowisata Bukit Lawang, ancaman yang dilihat dari ekowisata bukit lawang dan menjadi tugas pembenahan dalam pengembangan ekowisata bukit lawang dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari segi infrastruktur agar wisatawan ingin berkunjung lagi, disamping itu di dirikanya pondok-pondok kecil dengan terpal biru secara berlebihan di pinggirian sungai bukit lawang merusak ke estetikan pemandangan dari ekowisata tersebut. Hal tersebut menjadi tugas pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten langkat untuk memberikan arahan serta himbauan dan memberikan jalan keluar dari hal tersebut.

Dimensi Disposisi, Disposisi, yaitu Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata. Dengan indikator - indikator sebagai berikut , Komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan. Adanya persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata. Berdasarkan hasil observasi bahwa pada dimensi disposisi untuk indikator komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan sudah berjalan dengan baik. Komitmen dilakukan oleh para pelaksana kebijakan juga di lakukan dengan pimpinannya itu sendiri begitupun dengan sikap yang dapat di ambil itu juga berawal dari level

yang di atasnya. Komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan penting dilakukan sejak awal untuk menentukan arah kebijakan sendiri akan seperti apa kedepannya begitupun dengan sikap para pelaksana kebijakan itu sendiri. Kemudian berdasarkan hasil observasi bahwa pada dimensi disposisi dalam indikator persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata sudah berjalan baik. Hal ini terbukti dengan kemunculan strategi yang akan dilakukan Pemkab didukung penuh oleh organisasi guna menaikan obyek wisata sungai bukit Lawang menjadi obyek wisata super prioritas.

Dimensi Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi Menurut Edwards III , yaitu : Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi program. Dengan Indikator - indikator sebagai berikut, Ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor, Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait, Kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi hambatan untuk indicator ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor sudah ada dan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada namun menemui hambatan disebabkan seperti sulitnya mengaplikasikan tugas sesuai dengan SOP yang ada ke masyarakat karena perbedaan pemahaman seperti mengenai seragam yang harus digunakan untuk berenang serta sulitnya menghimbau pelaku wisata agar tidak mendirikan pendopo pada bibir sungai. Banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai aturan yang boleh atau tidak boleh dilakukan di Sungai bukit Lawang. Sementara itu berdasarkan hasil observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi menurut peneliti tidak ada hambatan dalam indikator hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait tidak adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan saling lempar tanggung jawab antar instansi tersebut. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pada dimensi struktur birokrasi indikator kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sudah ada tata kelola SDM yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan organisasi yang dibawah naungan Pemkab sudah sesuai kemampuan nya bahkan banyak juga masyarakat yang memiliki kemampuan sebagai *guide* walaupun tidak tergabung pada organisasi.

Tabel 1. Sarana Dan Prasarana Dalam Site

No	Sarana Dan Prasarana	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Visitor Center	✓	
2.	Jalan Trail	✓	
3.	Canopy Trail	✓	
4.	Camping Ground	✓	
5.	Pintu Gerbang Kawasan	✓	
6.	Panel Peta	✓	

Sumber: Portal Informasi Taman Nasional Gunung Leuser



Gambar 1. Peta Bukit Lawang
Sumber: Langkat Tourism

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, sampai pada analisis data dalam penelitian ini, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, Implementasi kebijakan pengembangan Obyek wisata Sungai bukit Lawang oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat cukup baik. Dimana hasil wawancara maupun observasi menunjukkan bahwa untuk indikator-indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Langkat kurang. Himbauan atau pembinaan kepada wisata bagaimana sikap yang harus dilakukan pada tempat wisata dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sarana yang dibangun belum terjamin keamanannya. Pemerintah perlu menghimbau retribusi yang dilakukan oleh pihak atau organisasi tanpa campur tangan oknum-oknum yang hanya mengambil keuntungan semata. pembinaan teknologi serta promosi dari dinas pariwisata. Menyediakan serta memberikan fasilitas infrastruktur yang memadai kepada wisatawan seperti akses jembatan penyebrangan, Toilet umum yang bersih, Musholla yang bersih, Lahan parkir yang Luas, Terminal, Atm, Rumah sakit, tenaga kesehatan yang berkompeten, Pasar, serta memberikan fasilitas kepada organisasi berupa bentuk alat-alat untuk rescue atau penyelamatan dan kendaraan akomodasi bagi wisatawan yang mengalami cedera serius agar organisasi dapat bekerja sesuai prosedur dan strategi dinas dapat diimbangi dengan bukti nyata.

Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi menunjukkan bahwa adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan destinasi wisata sungai bukit Lawang oleh dinas pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Langkat seperti terkait dana APBN yang terbatas dan bukit Lawang juga tidak termasuk kepada daerah super prioritas dalam pembangunan sehingga pihak dinas pariwisata masih berjalan ditempat dalam pembangunan obyek wisata . Namun demikian Adapun juga faktor pendukung dari pihak dinas dalam pengimplementasian pembangunan obyek wisata bukit Lawang adalah dengan dibuat nya aplikasi Langkat Tourism yaitu sebuah aplikasi guna mendukung pelaku usaha di bukit Lawang dan factor pendukung lainnya ialah kini dinas pariwisata telah membeli lahan Kepada PTPN 2 seluas 2,3 Hektar guna untuk membangun dan mengembangkan obyek wisata sungai bukit Lawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (revisi). Alfabeta.
- Apriani, L., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perawat terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUD Dr . R . M Djoelham Kota Binjai. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 108–114. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1405>
- Atiah, K. N., Badaruddin, B., & Siregar, N. S. S. (2022). Implementasi Kebijakan Diklat Struktural Pim III Pada Dinas Pariwisata Dan Olahraga Kabupaten Batu Bara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 564–573. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1255>
- Hardiman Sihombing, Humaizi, & Harmona Daulay. (2023). Pengembangan Objek Wisata Pantai dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 12(1), 238–250. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7843>
- Hidajat, R., Prastiawan, I., Rochayati, R., & Suharyanto, A. (n.d.). *Tourism Performances Management Patterns and the Role of Maecenas in Ramayana Play Presentation as A Tourist Attraction in Indonesia and Thailand*.
- Lubis, F. R. A., Suharyanto, A., Effendy, R., Meidasari, V. E., & Shahnaz, L. (2020). Role of facebook advertising in promoting tourism in Asia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 1286–1296. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200228>
- Marini, Y., Marina, N., & Arnita, V. (2023). Potensi Pengembangan Desa Wisata dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dengan Menggunakan Analisis SWOT di Desa Pematang Serai Langkat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2357–2364. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1581>
- Moleong, L. . (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, T., Budiman, A., & Rachmawati, D. (2020). Rekreasi, Hiburan, Belajar: Studi Kegiatan Wisata Seni dan Budaya di Saung Angklung Udjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 693–702. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.396>
- Pratomo, J. (2015). *Analisis Kondisi Objek Wisata Pusat Pengamatan Orangutan Sumatera di Taman Nasional Gunung Leuser Bukit Lawang Kabupaten Langkat*. UNIMED.
- Rahman, Z. (2021). *Regional Tourism Development Planning : A Structured Literature Review*. 9(2), 150–162. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i2.5208>

- Rini, E. S., Absah, Y., Fawzee, B. K., & Alfifto, A. (2022). Tourism Image, Experiential Value, Experiential Satisfaction dan dampaknya terhadap Revisit Intention. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2649–2654. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1180>
- Sari, L. N., & Pinem, M. (2023). Kontribusi Objek Wisata Pantai Sujono Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2149–2159. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1557>
- Sinuhaji, V. V., Siti, N., Siregar, S., & Jamil, B. (2019). Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan (Studi Deskriptif Kualitatif Wisata Bukit Gundaling Berastagi) Marketing Communication Activities of the Karo District Tourism and Cultu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 105–118.
- Situngkir, B., Lubis, Z., & Kadir, A. (2020). *Peluang Pelaksanaan Manajemen Kolaboratif dalam Pariwisata di Kota Medan Opportunities for the Implementation of Collaborative Management in the Development of China City Site Areas as a Tourism Potential in Medan City*. 9(2), 149–167.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Alfabeta.
- Suharyanto, A., Barus, R. K. I., & Batubara, B. M. (2020). Photography and Tourism Potential of Denai Kuala Village. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal*, 2(1), 100–108.
- Suharyanto, A., & Batubara, B. M. (2023). *Government Policy on Tourism Management in Situngkir Village Pangururan District Samosir Regency North Sumatra Indonesia*. 1814–1822. <https://doi.org/10.46254/au01.20220405>
- Suharyanto, A., Febryani, A., Wiflihani, W., & Batubara, B. (2019). Village Government Policy on Tourism Management in Situngkir Village. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (Formerly ICCSSIS), ICCSIS 2019, 24-25 October 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Suharyanto, A., Sihombing, M., Ridho, H., & Kusmanto, H. (2022). Public Service Management for Art Activists at the North Sumatra Cultural Park. *Proceedings of the First Australian International Conference on Industrial*.
- Syafira, A. Y., Kurniawati, E., & Hadi, N. (2021). Wisata Alam Coban Putri Sebagai Objek Dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Tlekung. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1105–1112. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.809>
- Syari, N. R., & Kadir, A. (2020). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Implementation of Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants*. 1(2), 156–164.
- Ulfa, M. L., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(1), 77. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2229>
- Zamzami, Z., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). The Role of the Tourism Office in Increasing Regional Original Income in the Maritime Tourism Sector. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2591–2596. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1664>
- UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan
- Perda Kab Langkat No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Bupati Langkat Nomor 60 Tahun 2017 Tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan”